

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RENJA) K/L
BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				123,679,457,000	
PROVINSI & Kab/Kota	5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				2,163,128,000	
	5245.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		22	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	513,184,000	
	5245.BAH.001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		22	Layanan, Bidang, Dokumen, Bulan	513,184,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	1	Laporan	82,197,000	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran
Provinsi		202 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Laporan	80,187,000	1. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 2. laporan penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses
kab/kota		301 Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penanganan dan penindakan pelanggaran.	10	Laporan	175,400,000	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
kab/kota		302 Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran penyelenggaraan penyelesaian sengketa proses	10	Laporan	175,400,000	1. Laporan koordinasi kab/kota semesteran
	5245.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	126,960,000	
RPJMN	5245.BDB.001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga, Unit Kerja, Tim	126,960,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah	126,960,000	34 provinsi + 18 satker K/K baru
	5245.BKC	Pemantauan Lembaga		55	Laporan	1,522,984,000	
	5245.BKC.001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota		55	Laporan	1,522,984,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	1	Laporan	78,528,000	1 laporan@34 provinsi
Provinsi		202 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI dan Instansi terkait	1	Laporan	275,188,000	- laporan semester
Provinsi		203 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	1	Laporan	59,850,000	
Provinsi		204 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	1	Laporan	39,586,000	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan
Provinsi		205 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Provinsi)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	86,028,000	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12)
kab/kota		301 Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	10	Laporan	175,400,000	1 laporan@514 KK

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
kab/kota		302 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan semesteran fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Instansi terkait	10	Laporan	183,554,000	-laporan semester
kab/kota		303 Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	10	Laporan	175,400,000	
kab/kota		304 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan (Kab./Kota)	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	10	Laporan	238,800,000	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan
kab/kota		305 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	10	Laporan	210,650,000	- IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 12) - 1 laporan@514 KK
	6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU				44,210,892,000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		2,274	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyelur	43,304,492,000	
	6661.QIC.001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu		577	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyelur	42,049,929,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen	458,400,000	
Provinsi		202 Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan	167,251,000	
Provinsi		203 Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan	522,980,000	
Provinsi		204 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Provinsi)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	400,950,000	
Provinsi		205 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	642,400,000	
Provinsi		206 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Provinsi)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	169,180,000	
Provinsi		207 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Provinsi)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan	1,011,321,000	Laporan triwulan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi
Provinsi		208 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Provinsi)		4	Laporan	176,515,000	Laporan triwulan kegiatan Ketua Provinsi
Kabupaten/Kota		301 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	10	Laporan	2,860,860,000	
Kabupaten/Kota		302 Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	20	Laporan	2,278,700,000	
Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kab./Kota)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	40	Laporan	6,296,040,000	
Kabupaten/Kota		304 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	20	Laporan	2,010,800,000	
Kabupaten/Kota		305 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	40	Laporan	5,094,250,000	
Kabupaten/Kota		306 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	40	Laporan	794,800,000	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Kabupaten/Kota		307 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	40	Laporan	6,187,842,000	Laporan triwulan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi Kab/Kota
Kabupaten/Kota		308 Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)		40	Laporan	1,724,638,000	Laporan triwulan kegiatan Ketua Kab/Kota
Kecamatan		401 Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu (Kecamatan)	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	151	Laporan	1,646,780,000	
Kecamatan		402 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	151	Laporan	9,606,222,000	Laporan kegiatan Ketua dan Seluruh Divisi Kecamatan
	6661.QIC.003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		1,697	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1,254,563,000	
		Komponen Input :					
Kecamatan		401 Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	1,697	Daerah	1,254,563,000	
	6661.UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		46	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	906,400,000	
	6661.UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		46	Sistem Informasi, Modul Aplikasi, Layanan	906,400,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Provinsi)		6	Unit	86,400,000	
Kabupaten/Kota		301 Pengadaan sarpras pendukung sistem informasi (Kab./Kota)		40	Unit	820,000,000	
	6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU				1,377,968,000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		11	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1,377,968,000	
	6662.QIC.001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu		11	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	1,377,968,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	95,968,000	
Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan fasilitasi sentra gakkumdu	10	Laporan	1,282,000,000	
	6838	PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU OLEH LEMBAGA AD-HOC				43,379,774,000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		4,018	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	43,379,774,000	
	6838.QIC.001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc		1,848	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	29,293,700,000	
		Komponen Input :					
Kecamatan		401 Honorarium (Kecamatan)		151	Daerah	14,360,100,000	Ketua = 1 org x 6 bln Anggota = 2 org x 6 bln Kasek = 1 org x 6 bln Pelaksana PNS = 2 org x 6 bln Pelaksana Non PNS = 3 org x 6 bln Tenaga pendukung = 2 org x 6 bln

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Kelurahan/Desa		501 Honorarium (Kelurahan/Desa)		1,697	Orang	14,933,600,000	8 bulan
	6838.QIC.002	Operasional Pengawas Ad-Hoc		2,170	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	14,086,074,000	
		Komponen Input :					
Kabupaten/Kota		301 Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)		10	Lembaga	6,581,400,000	(Ketua + Anggota + Kasek) x 12 bulan
Kabupaten/Kota		302 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)		10	Lembaga	678,000,000	Sewa Kantor/Ruang Sidang/Gakkumdu = 12 bulan
Kecamatan		402 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)		151	Daerah	4,530,000,000	6 bulan
Kecamatan		403 Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan (Kecamatan)		151	Daerah	0	6 bulan
Kecamatan		404 Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)		151	Daerah	2,042,124,000	6 bulan
Kelurahan/Desa		502 Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)		1,697	Orang	254,550,000	
	6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				15,064,882,000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6839.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1,881	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	14,360,772,000	
	6839.QIC.001	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih		1,881	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	14,360,772,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	86,880,000	
Provinsi		202 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1	Laporan	301,072,000	
Provinsi		203 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	87,320,000	
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	10	Laporan	1,984,200,000	
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	10	Laporan	1,223,100,000	
Kabupaten/Kota		303 Fasilitas sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	10	Laporan	901,800,000	
Kecamatan		401 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	151	Laporan	1,630,800,000	
Kelurahan/Desa		501 Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	1,697	Laporan	8,145,600,000	
	6839.QCE	Penanganan Perkara		11	Perkara, Berkas Perkara	704,110,000	
	6839.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih		11	Perkara, Berkas Perkara	704,110,000	
		Komponen Input :					

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	92,110,000	
Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	10	Perkara	612,000,000	
	6840	PENGAWASAN PENETAPAN PESERTA PEMILU				4,746,589,000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6840.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		33	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	2,566,755,000	
	6840.QIC.001	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu		33	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	2,566,755,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	97,080,000	
Provinsi		202 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	1	Laporan	76,080,000	
Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan	83,720,000	
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	10	Laporan	925,044,000	
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan penetapan peserta pemilu	10	Laporan	636,351,000	
Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan fasilitasi sentra gakkumdu	10	Laporan	748,480,000	
	6840.QCE	Penanganan Perkara		33	Perkara, Berkas Perkara	2,179,834,000	
	6840.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Penetapan Peserta Pemilu		33	Perkara, Berkas Perkara	2,179,834,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	33,140,000	
Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	93,600,000	
Provinsi		203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	95,030,000	
Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	10	Berkas Perkara	621,000,000	
Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	10	Perkara	639,000,000	
Kabupaten/Kota		303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses penetapan peserta pemilu (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	10	Perkara	698,064,000	
	6841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN				4,079,930,000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6841.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		22	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	3,169,090,000	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	6841.QIC.001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan		22	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	3,169,090,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	97,080,000	
Provinsi		202 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1	Laporan	67,260,000	
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	10	Laporan	1,306,000,000	
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	10	Laporan	1,698,750,000	
	6841.QCE	Penanganan Perkara		11	Perkara, Berkas Perkara	910,840,000	
	6841.QCE.001	Penanganan Pelanggaran Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan		11	Perkara, Berkas Perkara	910,840,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	58,840,000	
Kabupaten/Kota		301 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	10	Perkara	852,000,000	
	6842	PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA				8,656,294,000	Kegiatan Tahapan Pemilu (PN)
	6842.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		184	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	5,623,060,000	
	6842.QIC.001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		184	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur	5,623,060,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	160,080,000	
Provinsi		202 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	1	Laporan	85,260,000	
Provinsi		203 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan	87,320,000	
Kabupaten/Kota		301 Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan publikasi dan dokumentasi	10	Laporan	1,984,200,000	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Kabupaten/Kota		302 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	10	Laporan	1,630,800,000	
Kabupaten/Kota		303 Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	10	Laporan	656,150,000	
Kecamatan		401 Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	Jumlah laporan pengawasan tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota	151	Laporan	1,019,250,000	
	6842.QCE	Penanganan Perkara		33	Perkara, Berkas Perkara	3,033,234,000	
	6842.QCE.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		33	Perkara, Berkas Perkara	3,033,234,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	1	Berkas Perkara	63,680,000	
Provinsi		202 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	1	Perkara	81,680,000	
Provinsi		203 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Provinsi)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	1	Perkara	77,810,000	
Kabupaten/Kota		301 Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah dokumen yang dilakukan pengelolaan	10	Berkas Perkara	852,000,000	
Kabupaten/Kota		302 Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan kegiatan penanganan pelanggaran	10	Perkara	852,000,000	
Kabupaten/Kota		303 Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	10	Perkara	1,106,064,000	
	115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				30,336,868,000	
	6849	PENGLOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM				27,906,711,000	
	6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		33	Layanan, Laporan, Dokumen	25,239,781,000	
	6849.EBA.956	Layanan BMN		11	Layanan, Laporan, Dokumen	236,870,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	95,870,000	1. Laporan inventarisasi aset persemester 2. Laporan SIMAK BMN persemester 3. Laporan Pembinaan (bimtek) pengelolaan BMN 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan BMN ke Kab/Kota
Kab/kota		301 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan inventarisasi aset	10	Laporan	141,000,000	Semesteran
	6849.EBA.994	Layanan Perkantoran		22	Layanan, Laporan, Dokumen	25,002,911,000	
		Komponen Input :					
Provinsi/Kab/kota		001 Gaji dan tunjangan	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	11	Layanan	9,793,094,000	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Provinsi/Kab/kota		002 Operasional dan pemeliharaan kantor	Persentase penyelesaian pembayaran gaji pegawai kontrak yang tepat waktu	11	Layanan	15,209,817,000	
	6849.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		65	Unit, M2, Paket	1,042,500,000	
	6849.EBB.951	Layanan Sarana Internal		59	Unit, M2, Paket	742,500,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		202 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	7	Unit	75,000,000	
Provinsi		203 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	12	Unit	67,500,000	
Kab/kota		302 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	40	Unit	600,000,000	
Kab/kota		303 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit	0	
	6849.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		6	Unit, M2, Paket	300,000,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit	0	
Kab/kota		301 Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	6	Unit	300,000,000	
	6849.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		44	Dokumen, Layanan, Laporan	1,624,430,000	
	6849.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		11	Dokumen, Layanan, Laporan	363,280,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	162,280,000	1. Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) dan revisi anggaran
Kab/kota		301 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	10	Dokumen	201,000,000	
	6849.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		11	Dokumen, Layanan, Laporan	262,620,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	51,120,000	1. Dokumen SAKIP (Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja dan perjanjian kinerja perubahan, Rencana Aksi, LKIP, SK-IKU) 2. Laporan Rencana Penyerapan Anggaran per triwulan 3. Laporan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kinerja sesuai dengan rencana aksi, RKA, dan dokumen perencanaan lainnya 4. Laporan supervisi dan monitoring pelaksanaan program ke Kab/Kota
Kab/kota		301 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	10	Dokumen	211,500,000	
	6849.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		11	Dokumen, Layanan, Laporan	789,020,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	213,020,000	1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran bulanan 2. Laporan keuangan semesteran
Kab/kota		301 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	10	Dokumen	576,000,000	Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bendahara pengeluaran pembantu bulanan
	6849.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu		11	Dokumen, Layanan, Laporan	209,510,000	
		Komponen Input :					

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Provinsi		201	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	45,610,000	
Kab/kota		301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	10	Dokumen	163,900,000	
	6850	PENGLOLAAN ORGANISASI DAN SDM				1,456,469,000		
	6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			46	Layanan, Laporan, Dokumen	1,224,279,000	
	6850.EBA.957	Layanan Hukum			23	Layanan, Laporan, Dokumen	615,914,000	
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	73,150,000	1. laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum 2. Laporan supervisi dan monitoring evaluasi pelaksanaan produk hukum ke Kab/Kota
Provinsi		202	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan diseminasi produk hukum terkait kepemiluan	1	Laporan	81,214,000	
Provinsi		203	Kajian hukum di Bawaslu Provinsi	Laporan kajian hukum	1	Laporan	73,750,000	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
Kab/kota		301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan produk hukum dan layanan hukum	10	Laporan	223,900,000	
Kab/kota		302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Laporan kajian hukum	10	Laporan	163,900,000	Kajian untuk produk hukum dan non produk hukum
	6850.EBA.962	Layanan Umum			11	Layanan, Laporan, Dokumen	193,210,000	
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Provinsi		1	Laporan	65,710,000	Kegiatan Ketua Provinsi
Kab/kota		301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota		10	Laporan	127,500,000	Kegiatan Ketua Kab/Kota
	6850.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum			12	Layanan, Laporan, Dokumen	415,155,000	
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Pendampingan dan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	122,258,000	
Provinsi		202	Pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	76,484,000	Pelatihan, Sosialisasi, peningkatan kapasitas, jasa konsultan, penyelesaian kasus hukum
Kab/kota		301	Bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	10	Laporan	216,413,000	Hanya paket jasa konsultan (advokat)
	6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			304	Orang, Layanan	232,190,000	
	6850.EBC.954	Layanan Manajemen SDM			304	Orang, Layanan	232,190,000	
		Komponen Input :						
Provinsi		201	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	54	Orang	98,690,000	Seluruh pegawai provinsi
Kab/kota		301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	250	Orang	133,500,000	Seluruh pegawai kabupaten/kota
	4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL				225,840,000		
	4355.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			11	Dokumen, Layanan, Laporan	225,840,000	

UKE (Unit Kerja Eselon)	Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target	Satuan	Pagu Anggaran TA. 2023	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	4355.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja		11	Dokumen, Layanan, Laporan	225,840,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	1	Dokumen	59,340,000	
Kab/kota		301 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, dan survey kepuasan layanan	10	Dokumen	166,500,000	
	4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI				747,848,000	
	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		22	Layanan, Laporan, Dokumen	747,848,000	
	4356.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu		11	Layanan, Laporan, Dokumen	488,446,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan	134,446,000	Keterbukaan informasi publik (Indikator IKU) 1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasikan dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu provinsi 4. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi ke Kab/Kota
Kab/kota		301 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	10	Laporan	354,000,000	1. Laporan pengelolaan informasi yang dipublikasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik persemester 2. Laporan hasil evaluasi kehumasan meliputi peliputan dan dokumentasi 3. Laporan pengelolaan web Bawaslu Kab/Kota
	4356.EBA.963	Layanan Data dan Informasi		11	Layanan, Laporan, Dokumen	259,402,000	
		Komponen Input :					
Provinsi		201 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan	88,902,000	1. Laporan pengelolaan dan pengembangan PPID persemester 2. Laporan supervisi dan monitoring pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik ke Kab/Kota
Kab/kota		301 Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan dan pengembangan PPID	10	Laporan	170,500,000	Semester
TOTAL						154,016,325,000	

Catatan :

1. Alokasi anggaran berpedoman pada surat edaran pagu anggaran masing-masing satker;
2. Seluruh komponen input perlu di alokasikan anggarannya.

154,016,325,000
0